

Media Komunikasi Kelompok Pendamping Desa Optimalkan Pembangunan di Kecamatan Banjarangkan

I Wayan Suartawan

Program Studi Hubungan Masyarakat Universitas Bali Dwipa, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: I Wayan Suartawan

E-mail: suarta1@yahoo.com

Abstrak

Kemampuan komunikasi kelompok Pendamping Desa dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di perdesaan merupakan tujuan Negara Indonesia. Namun, implementasinya tak semudah merencanakan. Menghadapi masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang pendidikan, mata pencaharian, pengalaman, usia maupun kepentingan yang berbeda tidaklah mudah. Diperlukan media dan metode komunikasi yang humanis serta efektif dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, terutama melibatkan kaum perempuan dan kaum marginal di desa. Sehingga Pendamping Desa mampu berkomunikasi dan mewujudkan desa yang berdaulat di berbagai bidang. Pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pengabdian bertujuan untuk memberikan pengetahuan media komunikasi serta penggunaan metode komunikasi bagi para Pendamping Desa dalam melaksanakan tugas.

Kata kunci - Media komunikasi pendamping desa, efektifkan pembangunan

Abstract

The group communication skills of Village Facilitators in realizing equitable development in rural areas is the goal of the State of Indonesia. However, its implementation is not as easy as planning. Facing Indonesian people with different educational backgrounds, livelihoods, experiences, ages and interests is not easy. Media and communication methods that are humanist and effective in mobilizing community participation in village development are needed, especially involving women and marginalized people in the village. So that the Village Facilitator is able to communicate and realize a sovereign village in various fields. This service was carried out in Banjarangkan District, Klungkung Regency. The service aims to provide knowledge of communication media and the use of communication methods for Village Facilitators in carrying out their duties.

Keywords - Village facilitator communication media, effective development

PENDAHULUAN

Membangun Indonesia tak mesti di pusat-pusat pemerintahan saja, membangun mestinya dilaksanakan dari pinggiran dan desa. Pembangunan ini merupakan upaya mensejajarkan kondisi perdesaan dengan kota dalam berbagai aspek, sehingga tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, hingga kini pemerataan pembangunan secara keseluruhan dirasakan belum optimal. Masih ada kesenjangan antara pembangunan di daerah perdesaan dan perkotaan. Perhatian Pemerintah Pusat dengan pembangunan di desa mulai dirasakan semenjak ditetapkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Undang-undang ini menjadikan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan bukan sebaliknya. Diketahui, sebelum diterbitkan UU tersebut, desa dan masyarakat desa sering diibaratkan objek serta topik saat kampanye saja, tanpa implementasi nyata dari janji yang saat kampanye tersebut.

Melalui UU ini, Pemerintah Pusat melimpahkan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Desa di Indonesia. Kewenangan tersebut antara lain desa bisa mengatur serta mengelola rumah tangga serta aset desa agar bisa dipergunakan untuk kepentingan desa sendiri. Menurut Nurcholis (2005:138) Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal menjalankan UU Desa, diperlukan pengetahuan serta pemahaman segenap unsur perangkat desa dan masyarakat. Perangkat Desa sebagai pelaku pembangunan di tingkat desa masih minim pemahaman berbagai aturan pelaksanaan UU Desa serta aturan turunannya. Perbedaan tingkat pendidikan, faktor usia, serta berbagai kendala sumber daya manusia di desa juga menjadi kendala. Mengatasi hal tersebut, Pemerintah Pusat juga menyebar ratusan Pendamping Desa profesional yang bertugas mendampingi serta memberdayakan masyarakat desa.

Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan di desa, sehingga Pendamping Desa yang merupakan bagian P3MD nantinya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dan marjinal. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang homogen tentu tidak mudah, diperlukan suatu metode komunikasi dan juga media yang tepat, sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat perempuan dan kaum marjinal merupakan bagian dari komunikasi pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping Desa (PD) merupakan langkah awal pelaksanaan pembangunan di desa. Oleh sebab itu tentunya pola serta media komunikasi pelaku pemerintahan di desa dan pendamping menjadi hal yang menentukan keberhasilan pemberdayaan masyarakat di desa. Disisi lain, masyarakat desa juga memiliki peran dan fungsi yang besar dalam menentukan serta langkah-langkah dalam mengambil keputusan. Menurut Everet M. Rogers, (1999) dalam Ninik Sri Rejeki dan Anita Herawati, (1999:21) penyuluh adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga. Penyuluh atau fasilitator berkewajiban untuk memberi yang masukan yang baik dalam proses pengambilan keputusan.

Pendekatan utama dalam konsep pengabdian masyarakat ini adalah pemberdayaan masyarakat berbasis media komunikasi. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam mengajak partisipasi masyarakat tersebut diperlukan metode dan media komunikasi yang efektif. Sehingga tujuan pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif dalam mewujudkannya.

METODE

Kegiatan pengabdian, pemberdayaan dan pendampingan dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan efektif, dari Bulan Juli 2023 sampai akhir Bulan September 2023. Kegiatan tersebut dilakukan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



dengan melalui serangkaian tahapan atau langkah-langkah. Yaitu tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap evaluasi. Tahap Persiapan yaitu, tim pelaksana melakukan observasi dan survei awal dengan melakukan koordinasi dengan jajaran Pendamping Desa Kecamatan Banjarangkan. Selanjutnya mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berlandaskan masalah serta fenomena di lapangan, sehingga pengabdian tepat sasaran. Hasil observasi tersebut menentukan permasalahan dan persetujuan dari pihak terkait atau pimpinan pendamping kecamatan untuk melakukan persiapan untuk tahap pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan yaitu tim pelaksana melakukan pengabdian dengan melibatkan dosen serta mahasiswa Universitas Bali Dwipa, pemberdayaan dan pendampingan kepada pendamping disesuaikan dengan fenomena di lapangan. Sebelum diselenggarakan programnya, tim terlebih dahulu melakukan penyusunan panduan, menyusun materi, jadwal sehingga kegiatan berjalan dengan optimal. Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan 2 alur kegiatan yaitu:

1) Sosialisasi

Sosialisasi ini berisi tentang penguatan wawasan dan pemahaman secara komprehensif terkait metode dan media komunikasi bagi kelompok Pendamping Desa. Apakah dengan pertemuan tatap langsung, pemutaran video, film dan media lainnya. Sosialisasi ini memanfaatkan berbagai media, dari media tradisional hingga modern. Sosialisasi ini dilakukan saat persiapan pelaksanaan rapat rutin hingga pertemuan-pertemuan informal pendamping di wilayah Kecamatan Banjarangkan. Pertemuan dengan masyarakat di Kantor Desa, Sekretariat Pendamping Desa, warung-warung bahkan sosialisai saat pendampingan kepada warga.

2) Pelatihan Pendampingan (Coaching Clinic)

Sebuah pendampingan kepada Pendamping Desa terkait metode dan media komunikasi yang efektif yang dipergunakan Pendamping Desa. Yakni memastikan informasi dan tujuan program bisa dilaksanakan di masyarakat. Menurut Everet M. Rogers, (1999) penyuluh adalah seorang yang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan berkewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi inovasi atau penemuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintahan Kecamatan Banjarangkan memiliki tanggung jawab, wewenang serta hak mengelola potensi desa di wilayah kecamatan sesuai dengan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Pelaku pembangunan di tingkat kecamatan ini sangat penting peranannya bagi tercapainya tujuan bersama, yaitu yang terwujudnya masyarakat desa yang sejajar dengan kondisi di perkotaan. Sebab melalui pelaku pembangunan di tingkat desa, berbagai undang-undang dan program dapat disosialisasikan dan direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Perangkat Desa dan seluruh pelaku di tingkat desa maupun kecamatan dapat dikatakan pusat ataupun motor dalam melakukan proses pelaksanaan dan penyebaran informasi, proses penerangan, proses perubahan perilaku. Seperti pendapat berikut menyebutkan bahwa proses pendidikan dan sebagai rakayasa sosial (Madikanto, 1993: 11-17).

Pendampingan dalam memberikan pelatihan terkait Media Komunikasi serta metode komunikasi kepada pelaku pembangunan di desa merupakan modal awal terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui saluran dan menimbulkan efek tertentu. Dalam definisi lain juga dijelaskan secara singkat bahwa komunikasi adalah cara berhubungan yang ditujukan pada orang lain atau massa/kelompok dengan menggunakan alat-alat komunikasi atau tanpa alat komunikasi yaitu komunikasi yang secara langsung berhadapan-hadapan atau face to face (Sihite, 2000: 49).



Gambar 1.

Pertemuan Dengan Pendamping Desa terkait Media Inovasi Desa

Menurut Rogers dan D. Lawrence (dalam Hafied Cangara, 2003:19) menyatakan komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi satu dengan yang lainnya, yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Dari beberapa pengertian komunikasi diatas setidaknya komunikasi memiliki beberapa unsur seperti yang dikemukakan Hafied Cangara, (2004:23), adalah sebagai berikut, yakni: (1) sumber atau source dan penerima atau receiver. (2) pesan atau message, (3) media atau channel, dan (4) efek. Dengan teknologi yang semakin canggih, maka menjadi semakin sulit membedakan antara media komunikasi massa dengan komunikasi antar pribadi. Sehingga semakin kabur untuk kita dalam memberikan definisi yang tepat. Misalnya saja internet bisa digunakan sebagai media untuk komunikasi antar pribadi dengan adanya surat elektronik atau e-mail. Akan tetapi juga dapat digunakan sebagai media massa, dalam hal ini jika internet dipergunakan untuk website yang berisi informasi-informasi yang sifatnya untuk disampaikan pada khalayak ramai. Sementara itu, di desa-desa yang belum terjangkau oleh teknologi atau yang masih tradisional, media komunikasi juga mencakup kegiatan dan tempat-tempat tertentu seperti tempat suci atau pura, balai banjar, balai desa, panggung kesenian, pesta rakyat, termasuk juga arisan-arisan dapat dikatakan sebagai media komunikasi.

Menurut Efendi Gazali (dalam Ngalimun, 2017: 33), menyatakan komunikasi juga mesti saling mempengaruhi segala bentuk sikap dan perilaku orang lain agar mengikuti apa yang diharapkan. Efendi Gazali, menjelaskan fungsi komunikasi ada empat fungsi utama komunikasi yaitu:1) Menginformasikan (to inform), yakni memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu peristiwa, masalah, pendapat, pikiran, kebijakan, peraturanmaupun segala tingkah laku orang lain dan apa yang disampaikan orang lain; 2) Mendidik (to educate), yakni sebagai sarana pendidikan, karena melalui komunikasi, manusia dalam suatu lingkungan dapat menyampaikan segala bentuk pengetahuan, ide, gagasan kepada orang lain sehingga orang lain dapat menerima segala bentuk informasi yang kita berikan; 3) Menghibur (to entertain), komunikasi juga berfungsi untuk menghibur orang lain dan menyenangkan hati orang lain; 4) Mempengaruhi (to influence). Selain sebagai sarana untuk menyampaikan pendidikan, informasi dan sebagai sarana dalam menghibur orang lain, komunikasi juga berfungsi untuk memberikan pengaruh kepada orang lain.

Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali sebenarnya tidak bisa lepas dari media serta metode komunikasi antar pelaku pemberdayaan di kecamatan. Mengacu pada kata "Empowerment", yaitu sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pendekatan komunikasi kelompok perempuan dan kaum marjinal pada pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Banjarangkan dalam pengembangan masyarakat pedesaan adalah penekanan pada pentingnya peran masyarakat lokal terutama kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam membangun desa, sehingga mereka mampu membentuk sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu dan kelompok perempuan dan kaum marjinal bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.



Gambar 2.

Sosialisasi Media Komunikasi di Kecamatan Banjarangkan

Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berpusat pada manusia, khususnya kelompok perempuan dan kaum marjinal (people centered development) melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal di Kecamatan Banjarangkan. Pemberdayaan tersebut merupakan mekanisme perencanaan yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Kecamatan Banjarangkan khususnya kelompok perempuan dan kaum marjinal dalam mengaktualisasikan dirinya terutama potensi yang dimiliki. Program Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) merupakan program pemerintah yang dipayungi UU No. 06 Tahun 2014. Program ini bertujuan menangani masalah kemiskinan dan mengembangkan potensi desa guna terwujudnya peningkatan dan pengentasan kemiskinan dan menuju tercapainya Millenium Development Goals atau MDGs.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Banjarangkan dalam menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, Pemerintah Desa membuat Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan acuan UU Desa Tahun 2014 yang melibatkan masyarakat dimaksud. Melalui acuan tersebut APBDesa dirumuskan kembali mekanisme upaya memberdayakan kelompok perempuan dan kaum marjinal desa. Mereka dilibatkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi kegiatan tersebut. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, kaum perempuan dan kaum marjinal dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek upaya penanggulangan kemiskinan.

Dari partisipasi yang diikuti tersebut, masyarakat di Kecamatan Banjarangkan, jika proses sosialisasi dilakukan dengan media yang salah sudah tentu tidak akan mencapai sasaran, tentu tujuan yang akan dicapai juga tidak sesuai. Seperti yang diungkapkan Rogers dan Shoemaker (1987) mengatakan bahwa diantara saluran komunikasi yang ada, saluran interpersonal masih memegang peranan penting dibanding dengan media-media lainnya, terlebih di Negara yang belum maju, dimana kurang tersedianya media massa yang banyak menjangkau khalayak, terutama warga perempuan dan kaum marjinal di Kecamatan Banjarangkan, yang lemah tingkat literasi medianya.

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. UU Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UU Desa mengonstruksi cara pandang baru praktis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mesti mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

Perubahan dan paradigma baru atas desa itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan UU Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi UU Desa.

Dalam kerangka itulah, Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan khusus kepada kelompok perempuan dan kaum marjinal sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan: (1) meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; (2) meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; (3) meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan (4) mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Tentunya dengan menggunakan media komunikasi yang efektif.



Gambar 3.

Konsolidasi hasil Pendampingan dan Pengabdian

KESIMPULAN

Simpulan dari data tersebut bahwa masyarakat dan pelaku pembangunan di Kecamatan Banjarangkan yang tersebar di seluruh desa, memilih dan menyatakan bahwa media komunikasi

baliho adalah yang paling sering dipergunakan dan dipakai yang bisa membuat masyarakat mengerti maksud dan tujuan program. Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa media komunikasi baliho, spanduk dan media cetak lainnya adalah metode komunikasi yang paling dilihat oleh masyarakat, karena bisa membuat mereka mengerti dan mendapatkan informasi yang jelas. Media ini juga dilihat masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program ini mereka menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi dan media massa atau media sosial adalah hal yang paling menarik, namun presentase yang kecil.

Tahapan pelatihan membuat media komunikasi yang dilakukan oleh Pendamping Desa, yakni: (1) Diawali dengan mengikuti sosialisasi ke banjar/dusun di seluruh Kecamatan Banjaringan dengan menggunakan media LCD proyektor. Pelaku pemberdayaan bersama pihak terkait langsung bertemu dengan kelompok masyarakat di banjar atau dusun, khususnya kelompok perempuan dan kaum marjunal; (2) Dengan melaksanakan musyawarah desa perencanaan khusus perempuan, yang diikuti khusus kelompok perempuan. Musyawarah desa ini dilaksanakan setelah semua dusun melaksanakan musyawarah sosialisai tingkat dusun, setelah itu pelaku pemberdayaan dan Pemerintah Desa akan segera melaksanakan musyawarah desa. Musyawarah desa khusus perempuan merupakan salah satu musyawarah yang wajib dilaksanakan. Dimana dalam musyawarah ini hanya diikuti oleh para perempuan dan mendapatkan prioritas pertama dalam menyerap anggaran di APBDes bersangkutan. Mereka membuat berbagai usulan yang mengutamakan kepentingan kaum marjinal dan kelompok perempuan; (3) Musyawarah kelompok campuran, merupakan media komunikasi kelompok yang dilakukan antar berbagai kelompok di desa. Musyawarah ini merupakan musyawarah yang memprioritaskan penggunaan APBDes dalam berbagai kegiatan. Peserta musyawarah ini berasal dari seluruh komponen kelompok di desa, seperti, kelompok perempuan, kaum marjunal, kelompok pemuda, lansia dan masyarakat umum.

Musyawarah serta seluruh tahapan yang dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan kedaulatan desa yakni: (1) meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin, kelompok perempuan secara mandiri di desa; (2) meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan; (3) meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel; (4) meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor); (5) meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; (6) meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya; (7) meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal; (8) meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keberdayaan serta upaya mengoptimalkan media komunikasi melalui masyarakat terletak pada proses pengambilan keputusan sendiri dan disampaikan dengan berbagai baliho, film serta media tradisional lainnya. Sehingga terwujud cara untuk mengembangkan pilihan-pilihan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development), yang melandasi wawasan pengelolaan sumber daya lokal (communitybased resource management).

DAFTAR PUSTAKA

- Agger, Ben. 2008. Teori Sosial Kritis(Terjemahan) Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Anonimus. 2006. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semarang: Dahara Prize.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



- Briggs, Asa. Burke, Peter. 2000. *A Sosial History of the Media*. Polity Press. Cambridge UK.
- Bjorn, Hattne. 1982. *Ironi Pembangunan di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan
- Cangara, H. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Departemen Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Oprasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta.
- Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2010. *Panduan Teknis Integrasi Perencanaan Pembangunan*. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjahna. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Effendy, Onong Uchjahna. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluh Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Sebelas Maret Univeristy Press
- McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory, An Introduction (2nd)*. Newbury Parks Sage
- Mulyana, Dedy. 1999. *Membangun Komunikasi yang Humanistik*. Bandung: Rosda
- Mulyana, Dedy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Mulyana, Deddy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. 2007. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Poerwardarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Ruslan, Rosady. SH.MM. 2008. *Manajemen Pulic Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Senjaya, Sasa Djuarsa. 1993. *Pengantar Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sumadi Dilla. 2006. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rakatama Media
- Sugiyono, Pof. Dr. 2009. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Wolton, Dominique. 2007. *Kritik Atas Teori Komunikasi : Kajian Dari Media Konvensional Hingga Era Internet* (terjemahan : Ninik Rochani Sjams) Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Werner J. Sessler, 2006. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Prenada Mulia